Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Gustifar Anhar

Grand Design

PELAYANAN KEPOLISIAN

di Wilayah Kepulauan

Editor :
Abdullah Kaunar
Rasid Pora

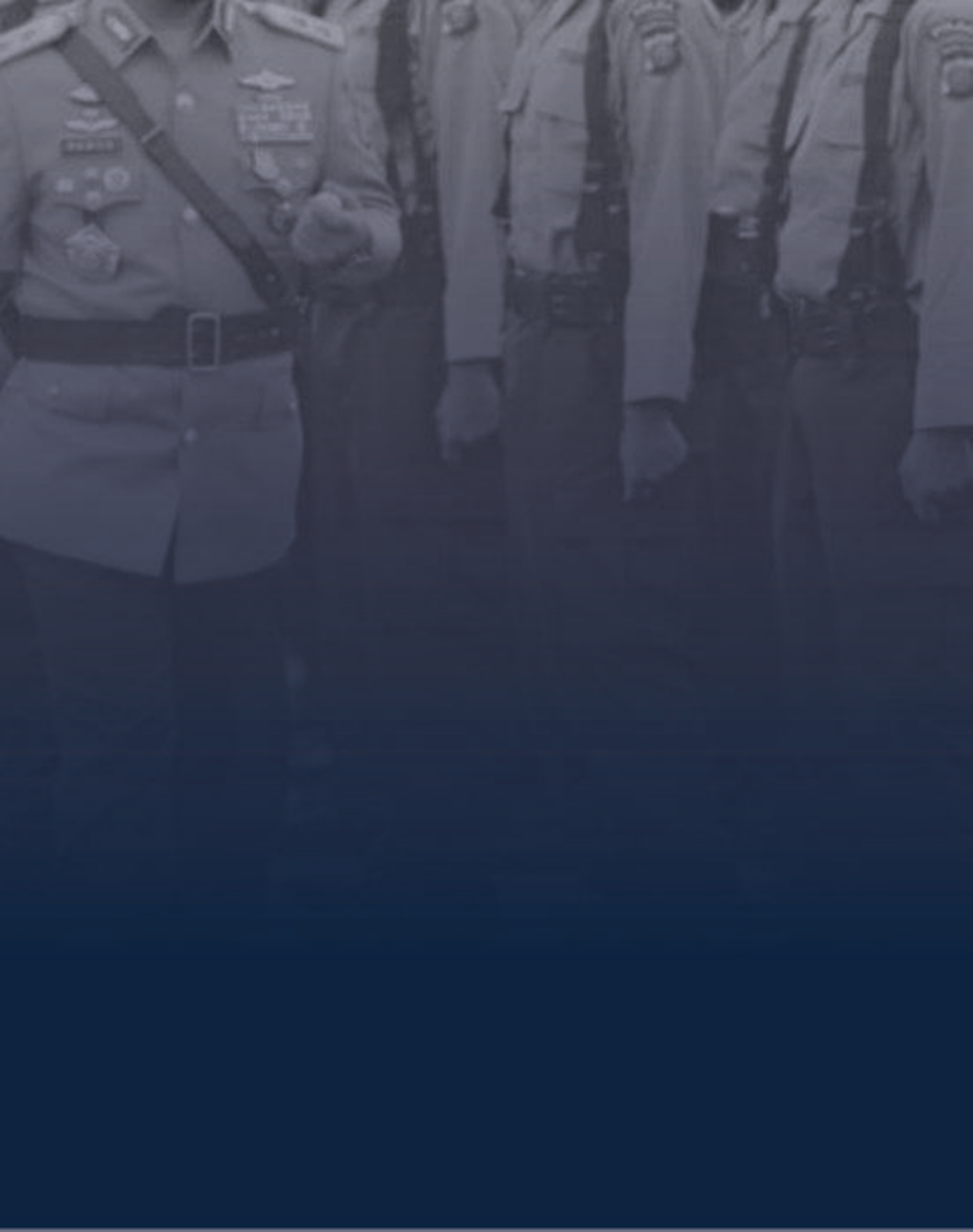

eureka
media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-220-0
9 786234 872200

GRAND DESIGN
PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPULAUAN

Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Gustifar Anhar

eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

GRAND DESIGN **PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPULAUAN**

Penulis : Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi. Ibrahim
Gustifar Anhar

Editor : Abdullah Kaunar
Rasid Pora

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-220-0

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA,**
OKTOBER 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahan nikmat, hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulisan Buku dengan Judul "*GRAND DESIGN* **PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH KEPULAUAN"** dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan penulis. Dalam buku ini penulis menguraikan berbagai persoalan dalam pelayanan kepolisian dan tentu juga grand design pelayanan kepolisian dalam rangka peningkatan pelayanan di wilayah kepulauan.

Penulis sepenuh hati menyadari bahwa Buku ini dapat disusun dengan baik karena adanya bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Olehnya itu penulis sangat berterima kasih untuk semua pihak, yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan karya buku ini, sehingga buku bisa sampai di tangan para pembaca.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa sesungguhnya karya buku masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunannya. Olehnya itu, masukan, saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan buku ini. Terima kasih untuk semua pihak, dan semoga buku ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya pada aspek pelayanan publik.

Ternate, 11 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS iii
DAFTAR ISI iv
BAB 1 MASALAH DALAM PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH TIDORE KEPULAUAN 1
BAB 2 SEKILAS PANDANG POLRES TIDORE 21
BAB 3 HADAGA SKCK: GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH TIDORE KEPULAUAN 57
BAB 4 PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH TIDORE KEPULAUAN 63
DAFTAR PUSTAKA 88
TENTANG PENULIS 90

BAB 1

MASALAH DALAM PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH TIDORE KEPULAUAN

A. Pendahuluan

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Pelayanan publik tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak Negara berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan (Dwiyanto, 2003:7).

Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan

BAB 2

SEKILAS PANDANG POLRES TIDORE

A. Polres Tidore: dari Masa ke Masa

1. Sejarah POLRES Tidore

a. Periode Sebelum Terbentuknya Provinsi Irian Barat di Soasio Tidore (Tahun 1950 S/D 1956)

Kepolisian di pulau Tidore pada awalnya adalah Distrik Kepolisian pada Tahun 1950 dan sebagai Komanndan Distrik adalah AIPTU TIEN WAHAB Setelah AIPTU TIEN WAHAB pensiun maka komandan Distrik Kepolisian Tidore diserahkan kepada BRIGADIR POLISI SALEH AHMAD.

b. Periode Setelah Terbentuknya Provinsi Irian Barat di Soasio (Tahun 1956 S/D 1962)

Sebuah keberpihakan kepada NKRI yang tidak ternilai harganya yang telah diperjuangkan oleh Kesultanan Tidore pada masa kemasa, maka oleh pemerintah R.I dapat menghargai jasa besar Kesultanan Tidore dalam upaya pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda, Pengharagaan itu diwujudkan oleh pemerintah pusat lewat Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1956 tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Propinsi Irian Barat yang berkedudukan di pulau Tidore dan

BAB 3

HADAGA SKCK: *GRAND DESIGN* PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH TIDORE KEPULAUAN

A. Program Hadaga SKCK di Kepolisian Resor Tidore

Surat Keterangan Catata Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitka oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keprluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentag orang tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik di Unit SKCK fungsi Intelkam bagian penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sangat konsen dalam mewujudkan hal tersebut di atas. Dimulai dari peniadaan pungutan liar dan biaya yang ada seuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tari Atas Jenis Penerimaan

BAB 4

PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH TIDORE KEPULAUAN

A. Pelaksanaan SKCK Di Kantor Kepolisian Resor Tidore

Seiring dengan keadaan sosial masyarakat yang semakin meningkat, dimana masyarakat semakin sadar akan kualitas maka diperlukan peningkatan kualitas atau mutu pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan. Artinya bahwa pihak pemerintah dan kepolisian berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) dan mengevaluasinya berdasarkan kaca mata pelanggan. Mutu mencakup tentang atribut-atribut kualitas pelayanan seperti daya tanggap, keyakinan, keramahan, dan efisien.

Dari sudut pandang pelanggan, kualitas pelayanan bisa berarti suatu empati dan tanggap akan kebutuhan pelanggan, pelayanan yang diberikan harus selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan serta harapan mereka (pelanggan/masyarakat), diberikan dengan cara yang mudah, ramah dan pelaksanaan pelayanan juga harus tepat waktu pengurusan perizinannya atau pengurusan lainnya. Dalam memberikan pelayanan publik, pihak pemberi layanan harus semaksimal mungkin untuk melayani kepentingan masyarakat, artinya bahwa pemberi layanan harus tepat

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid dan Ramelan, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terj., Jakarta: PPM, 2000.

Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.

Dwiyanto Agus, "*Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*", Yogayakarta: PSKK-UGM, 2003.Kompas, 23 September 2003.

_____ dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia,* Cet. Ketiga. Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 2008

Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan* Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka

Haerudin Ihsan, 2003, "*Anggaran Pro Rakyat Miskin*", Bujet, Edisi 9/Oktober.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Cides.

Lubis, M. .Solly, 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Sinar Baru Bandung

Priyanto Agus, 2003, "*Mendorong Partisipasi Publik untuk Transparansi APBD*", (Bujet, Edisi 10/Nopember – Desember.

Purwanto Agus, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media

Sadjijono, 1987, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino

Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Sutopo, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif : *Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Usman Husaini, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Bumi Aksara, Bandung.

Widodo, Joko, (2001), *Good Governance, Telaah Dari Dimensi; Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya, Insan Cendikia

Wayne, Parsons, 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media Group.

TENTANG PENULIS

Bakri La Suhu, S.IP, M.A,

Penulis Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdi sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak.

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus maupun jurnal nasional. Buku yang pernah penulis tulis yakni "KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan

Kebijakan & Konsensus) tahun 2021", "KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH" tahun 2022, "SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN" tahun 2022 serta "BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK" tahun 2022.

Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si,

Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN "Alauddin" Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Dosen Pascasarjana Ummu, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU, Direktur Pascasarjana (s2) Ilmu Adminisrasi (2018-2022), dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI Universitas Muhammadiyah Maluku Utara., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus dan Jurnal nasional, article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID iUm3WEwAAAAJ, Sinta ID 6095030 dan Scopus ID 57205387443. Buku Yang pernah di tulis: Epistimologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik (2019).

Penulis juga mempunyai sejumlah pengalaman: Menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014, Ketua FKDM Kota Ternate, Anggota Tim Pembahasan Penyerahan sebagian Kewenangan Walikota Ternate pada Pemerintah Kecamatan, Pembuatan Naskah Akademik PERDA disejumlah Kabupaten, Ketua TIM Peneliti di BAPPELITBANGDA Kota Ternate Tahun 2019, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kota Ternate, Nara sumber pada berbagai seminar dan kegiatan pemerintahan. Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020.

Gustifar Anhar, S.IP., M.Si,

Lahir di Pulau Tidore khususnya Kelurahan Doyado Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 12 Juni 1994. Menempuh pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2012-2017) dan melanjutkan Program Magister (S-2) Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate (2020-2022).

Penulis merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Kepolisian Daerah (POLDA) Maluku Utara yang dilantik sejak tahun 2013 dan ditempatkan di Kepolisian Resor (Polres) Tidore tahun 2014 hingga sekarang. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, penulis ditempatkan pada bagian Seksie Hukum (Sikum) Polres Tidore.